

Efektivitas Distribusi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat: Analisis Berdasarkan Indikator 6T dan Perspektif Ekonomi Islam

Sofiyah Nurussobah, Abdillah Mundir, Sukamto

Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: sofiyahnurussobah@gmail.com

Abstract

Food intervention policies in Indonesia have evolved from a goods assistance scheme (Raskin/Rastra) to a cashless, digital-based aid (BPNT/Sembako). However, the effectiveness of this program in reducing the persistently high poverty rate of 9.03% (BPS, 2024) in Kalirejo village remains questionable. This study aims to assess the effectiveness of BPNT distribution for Beneficiary Families (KPM) by utilizing the 6T indicators (Targeting, Quantity, Price, Timing, Administration, and Quality), alongside the perspective of distributive justice in Islamic Economics and Malthusian Theory concerning the disparities in local food availability. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation of the implementation of the Prosperous Family Card (KKS) and the role of E-Warong. The findings indicate that the digitization of aid does enhance the flexibility and autonomy of KPM, but its effectiveness is hindered by digital infrastructure disparities, literacy barriers, and targeting errors (including both inclusion and exclusion errors). The study reveals that the current policy appears to prioritize distribution mechanisms (output) over economic empowerment (outcome). Theologically, the inaccuracies in data violate the principles of trust and distributive justice ('adl). The research concludes that digital transformation must be accompanied by strengthening local distribution chains and aligning social aid policies with sustainable economic empowerment programs to ensure the long-term welfare of the community.

Keywords: *Effectiveness of Distribution, BPNT, KPM, 6T, Targeting Errors, Kalirejo Village.*

Abstrak

Kebijakan intervensi pangan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari sistem bantuan fisik (Raskin/Rastra) ke bantuan nontunai berbasis digital (BPNT/Sembako). Namun, keefektifan program ini dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih tetap di angka 9,03% (BPS, 2024) di Desa Kalirejo mengundang keraguan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas distribusi BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mempertimbangkan indikator 6T (Tepat Sasaran, Jumlah, Harga, Waktu, Administrasi, dan Kualitas) serta sudut pandang keadilan distribusi dalam Ekonomi Islam dan Teori Malthus terkait ketidakmerataan penyediaan pangan lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif atas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta peran E-Warong. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi bantuan meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian KPM, tetapi keefektifannya terhalang oleh perbedaan infrastruktur digital, masalah literasi, serta adanya kesalahan penargetan (termasuk kesalahan inklusi dan eksklusi). Penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan yang ada lebih menekankan pada proses distribusi (*output*) dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi (*outcome*). Dari sudut pandang teologis, ketidakakuratan data ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan distribusi ('adl). Penelitian menyimpulkan bahwa pergeseran ke digital harus disertai dengan penguatan jaringan distribusi lokal serta penyesuaian kebijakan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Keywords: Efektivitas Distribusi, BPNT, KPM, 6T, Targeting Error, Desa Kalirejo.

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih terus menjadi masalah struktural yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan sosial yang luas memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif. Sebagai tanggapan terhadap ketidakmerataan ekonomi yang tinggi, pemerintah melalui Kementerian Sosial melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Program Sembako. Program ini tidak hanya berperan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan daya beli serta akses nutrisi bagi keluarga rentan agar bisa bertahan di tengah perubahan ekonomi nasional.¹

Secara regulatif, penyaluran bantuan ini ditargetkan khusus bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mengacu pada pemenuhan kriteria kemiskinan tertentu. Pemerintah secara makro menggariskan kriteria kelayakan ini melalui indikator kemiskinan (seperti 14 indikator kemiskinan BPS) yang meliputi aspek pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatan, keterbatasan fasilitas sosial ekonomi, hingga kondisi fisik hunian seperti jenis lantai dan dinding rumah yang tidak layak. Penetapan parameter ini menjadi instrumen krusial agar alokasi dana perlindungan sosial dapat memenuhi asas ketepatan sasaran.

Di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Program Sembako menjadi andalan utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pokok bulanan mereka. Namun, efektivitas suatu kebijakan publik tidak hanya dinilai dari jumlah anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari akurasi distribusi dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.² Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data administratif di level pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kondisi nyata di tingkat desa. Ketidakcocokan data atau kesalahan dalam penargetan ini, baik dalam bentuk *inclusion error* (warga mampu terdaftar dalam bantuan) maupun *exclusion error* (warga miskin tidak mendapatkan bantuan), menjadi hambatan utama yang menghalangi pencapaian tujuan program. Masalah ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar warga.³ Tanpa

¹ K. Tabalong, P. K. Selatan, dan I. Telp, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten," 4 (2021): hlm. 1300.

² E. I. Syaripudin dan M. Tri Putri, "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): hlm. 106.

³ Y. Dodi, R. A. Ekaputri, dan I. Izharudin, "Analisa Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Serdang Indah Kecamatan Lua Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu," Ecoplan 7, no. 1 (2024): hlm. 15.

adanya verifikasi yang tepat, bantuan sosial berpotensi menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya dapat merusak rasa keadilan di dalam masyarakat.

Untuk memberikan ilustrasi mengenai pentingnya penelitian ini, Tabel 1 di bawah ini menyajikan perbandingan antara standar operasional prosedur (SOP) pemerintah dan kenyataan di lapangan yang ditemukan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Sintesis Masalah: Kesenjangan Regulasi dan Realitas Lapangan

Komponen	Harapan (SOP)	Kenyataan (Desa Kalirejo)
<i>Data KPM</i>	Berbasis DTKS (Desil 1-4)	Tidak sinkron dengan kondisi riil
<i>Verifikasi</i>	Melalui Musyawarah Desa	Cenderung formalitas/pasif
<i>Distribusi</i>	Digital & Tepat Sasaran	Hambatan literasi & <i>targeting error</i>

Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penelitian ini, berangkat dari permasalahan tersebut, studi ini tidak hanya akan melihat aspek teknis penyaluran, tetapi juga perlu diletakkan dalam kerangka teori yang solid. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas menjadi ukuran utama keberhasilan suatu program dalam mencapai target yang telah ditetapkan.⁴ Lebih dalam lagi, efektivitas distribusi bantuan memiliki dimensi moral yang mendalam dalam pandangan Ekonomi Islam. Prinsip keadilan distributif ('adl) mengharuskan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan berdasarkan keadilan dan amanah. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa semua tindakan pengelola negara dalam mendistribusikan hak rakyat harus berlandaskan kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah).⁵

Jika distribusi bantuan sosial tidak dilakukan dengan amanah dan data yang akurat, maka tujuan utama program untuk meningkatkan martabat para penerima manfaat tidak akan tercapai. Keadilan dalam ekonomi Islam bukan hanya soal pembagian yang merata, tetapi menempatkan bantuan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas efektivitas dari sudut pandang manajerial semata, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru (*novelty*) dengan mengintegrasikan verifikasi faktual 14 indikator kemiskinan dari BPS dalam kerangka ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem distribusi BPNT, menguji kesesuaian data KPM dengan kenyataan di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis

⁴ F. O. Toporundeng, W. Bogar, dan F. H. Mamonto, "Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa," 6, no. 1 (2026): hlm. 2026.

⁵ Intan Ardhy Pramesti, "Problematisa Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen" (Thesis, 2023), hlm. 3.

data untuk mewujudkan distribusi bantuan yang adil sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat Desa Kalirejo.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan menyeluruh mengenai efektivitas sistem distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako di tingkat akar rumput serta dampaknya secara riil bagi masyarakat. Lokasi penelitian (*lokus*) dipilih secara sengaja (*purposive*) di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena kesenjangan atau paradoks yang mencolok antara data administratif kemiskinan di tingkat pusat dan kondisi nyata kemiskinan yang terjadi di lapangan.⁷

Untuk menghasilkan data yang valid dan terpercaya, peneliti menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data lapangan melalui metode triangulasi yang meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada para informan kunci (*key informants*), yang terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya kelompok lanjut usia yang rentan terhadap hambatan literasi digital serta perangkat desa selaku pelaksana administrasi lokal. Sementara itu, observasi partisipatif diterapkan untuk memantau pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mengamati secara langsung operasional transaksi, peran, dan dominasi pasar *E-Warong* sebagai agen penyuplai pangan resmi. Sebagai pelengkap, studi dokumentasi dilakukan terhadap data sekunder berupa basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desa, khususnya pada kategori Desil 1–4, untuk divalidasi dengan kondisi ekonomi riil masyarakat setempat.⁸

Analisis data dalam riset ini beralih dari pengujian manajerial-teknis semata menuju pendekatan *Dual-Engine Framework* yang mengintegrasikan tiga instrumen analisis multidimensi secara komprehensif. *Pertama*, evaluasi kinerja teknis operasional diukur menggunakan parameter 6T dari pemerintah (Kementerian Sosial) yang mencakup indikator Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas. *Kedua*, untuk menguji keabsahan penargetan, data DTKS tersebut disinkronkan dan dibandingkan secara faktual menggunakan 14 indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) (seperti kondisi dinding rumah, jenis lantai, akses air minum, dan pendapatan kepala keluarga) guna mendeteksi tingkat kesalahan penargetan (*targeting error*), baik berupa kesalahan inklusi (*inclusion error*) maupun kesalahan eksklusi (*exclusion error*) pada data kemiskinan desa. *Ketiga*, temuan lapangan dikritisi secara teoretis melalui Teori Malthus untuk meninjau ketidakmerataan penyediaan pangan lokal akibat tekanan populasi, serta dibedah

⁶ D. Elia, Y. E. Wahyuningsih, dan Y. Yasrizal, "Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTSPM) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): hlm. 2242.

⁷ Nur, dkk., "Digitalisasi Bantuan Sosial dan Tantangan Literasi di Pedesaan," *Jurnal Kebijakan Sosial* 5, no. 1 (2025): hlm. 88.

⁸ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta: Pedoman Umum, 2020), hlm. 5.

secara etis-teologis melalui kacamata aksiologi Ekonomi Islam untuk menakar sejauh mana pemenuhan nilai amanah, kemaslahatan (*maslahah*), dan prinsip keadilan distributif (*'adl*) dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut.⁹

C. Pembahasan

1. Mekanisme Distribusi BPNT: Antara Efisiensi Prosedural dan Kendala Lapangan

Secara prosedural, mekanisme kepesertaan dan pendistribusian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diatur secara rigid oleh Kementerian Sosial melalui alur birokrasi yang ketat. Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat, masyarakat secara administratif wajib memiliki dokumen kependudukan yang valid dan sinkron pada basis data kependudukan nasional, yang meliputi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Sinkronisasi ini menjadi krusial untuk memastikan keabsahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar terhindar dari data ganda.

Secara ekonomi, calon penerima harus memenuhi kriteria kemiskinan makro, yang ditandai dengan bersarangnya nama kepala keluarga dalam klaster tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1–4) pada basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta wajib melampirkan dokumentasi visual berupa foto kondisi fisik rumah tinggal (tampak depan dan interior). Lebih lanjut, regulasi secara tegas menetapkan *exclusion criteria* (kriteria pengecualian), di mana pemohon dipastikan bukan merupakan bagian dari aparatur negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD ataupun pekerja formal berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR) yang tercatat pada sistem jaminan ketenagakerjaan nasional.

Untuk memfasilitasi syarat-syarat tersebut, pemerintah membuka dua jalur pengusulan utama:

- a. Jalur Mandiri (Digital): Calon penerima melakukan pengusulan secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos dengan mengunggah swafoto memegang KTP serta data spasial rumah tinggal.
- b. Jalur Kewilayahan (Formal/Kolektif): Pengusulan dilakukan melalui tingkat dusun dan desa. Syarat substantif jalur ini mewajibkan adanya validasi dan verifikasi faktual secara partisipatif melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Hasil mufakat Musdes kemudian diinput oleh operator lokal ke dalam sistem *Sistem Informasi Kesejahteraan*

⁹ Hanif Hidayattuloh, "Exclusion Dan Inclusion Error Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Jember Tahun 2021," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): hlm. 5.

Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk diserahkan ke Dinas Sosial kabupaten sebelum disahkan oleh Kementerian Sosial di tingkat pusat.

Implementasi Program Sembako di Desa Kalirejo secara prosedural di atas kertas telah mematuhi tahap-tahap teknis yang ditentukan oleh Kementerian Sosial tersebut. Namun, keberhasilan sistem distribusi digital ini tidak sejalan dengan kenyamanan KPM di lapangan. Penemuan menunjukkan bahwa meskipun KKS telah dibagikan, akses bantuan untuk KPM masih terkendala oleh perbedaan dalam literasi digital, terutama di kalangan kelompok lanjut usia. Kedisiplinan administratif ini pada akhirnya membenturkan idealitas regulasi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat melalui beberapa dimensi berikut:

a. Arsitektur Distribusi dan Degradasi Peran Aktor Lokal

Mekanisme ini menempatkan KPM sebagai pihak yang mandiri dalam melakukan transaksi. Namun, dalam kenyataannya, fungsi perangkat desa yang seharusnya menjadi penghubung informasi dan pengawas distribusi justru mengalami penurunan peran menjadi sekadar pelaksana administrasi. Kurangnya pengawasan ini membuat E-Warong beroperasi tanpa kontrol yang ketat, yang berdampak pada ketidakliberan KPM dalam memilih barang sesuai kebutuhan nyata mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Purnomo yang menyatakan bahwa tanpa adanya pendampingan yang mendalam, digitalisasi bantuan sosial sering kali membukakan peluang bagi praktik yang tidak transparan di level lokal.¹⁰

b. Disparitas Literasi Digital dan Ketergantungan Pihak Ketiga

Masalah utama dalam mekanisme ini adalah perbedaan yang mencolok dalam literasi digital di kalangan masyarakat. Walaupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah dibagikan secara merata, banyak KPM terutama yang berusia lanjut sering menghadapi kendala akses terhadap bantuan karena kesulitan dalam menggunakan sistem digital. Situasi ini menyebabkan KPM menjadi bergantung pada pihak ketiga, seperti pemilik E-Warong atau pendamping, untuk mendapatkan bantuan. Ketergantungan ini berdampak negatif pada prinsip transparansi dalam distribusi, karena KPM kehilangan kendali untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

c. Transisi Menuju Evaluasi Substansial

Setelah menemukan bahwa kendala teknis dan administratif sangat memengaruhi akses KPM terhadap bantuan, muncul pertanyaan penting tentang

¹⁰ Y. Dodi, R. A. Ekaputri, dan I. Izharudin, "Analisa Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu," *Ecoplan* 7, no. 1 (2024): hlm. 15.

keabsahan sistem. Apakah masalah ini hanya berkaitan dengan efisiensi distribusi saja, atau sebenarnya berawal dari ketidakakuratan data sasaran yang telah digunakan sejak awal? Ketidakcocokan antara data administratif dan kenyataan ekonomi di lapangan menjadi fokus utama yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami mengapa bantuan sosial belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh.

Permasalahan dalam distribusi di lapangan tidak bisa dipisahkan dari keakuratan data yang menjadi fondasi utama penyaluran. Walaupun prosedur teknis sudah diatur dengan baik, keberhasilan program tetap menjadi pertanyaan besar jika penerimanya tidak tepat. Dengan demikian, bagian berikutnya akan menganalisis efektivitas program menggunakan indikator 6T sebagai alat untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara data DTKS dan keadaan nyata KPM di Desa Kalirejo.¹¹

2. Analisis Efektivitas Berbasis Indikator 6T

Efektivitas program diukur melalui parameter 6T sebagai alat ukur operasional untuk melihat sejauh mana kebijakan telah mencapai target yang ditetapkan secara proporsional.

a. Evaluasi Kinerja 6T di Desa Kalirejo

Pelaksanaan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kalirejo dievaluasi menggunakan parameter 6T sebagai alat untuk menilai kinerja secara menyeluruh. Melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, terungkap kondisi pelaksanaan yang menunjukkan perbedaan antara capaian yang tercatat secara administratif dan efektivitas yang terjadi di lapangan, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. *Sintesis Kinerja Implementasi BPNT Berdasarkan Indikator 6T*

<i>Indikator</i>	<i>Capaian Lapangan</i>	<i>Analisis Deskriptif</i>
<i>Tepat Sasaran</i>	Rendah	Terdapat masalah duplikasi data di mana KPM yang telah sejahtera tetap mendapatkan bantuan, sementara warga miskin yang baru justru terlewat dari perhatian.
<i>Tepat Jumlah</i>	Tinggi	Dari segi administrasi, bantuan sebesar Rp200. 000 per bulan terlihat disalurkan dengan baik dan teratur.
<i>Tepat Harga</i>	Rendah	Harga barang di E-Warong seringkali lebih mahal daripada harga pasar setempat, sehingga mengurangi kemampuan beli nyata KPM.
<i>Tepat Waktu</i>	Sedang	Distribusi bantuan sering kali terganggu oleh perubahan jadwal, yang mengakibatkan

¹¹ Intan Ardhyia Pramesti, "Problematisa Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen" (Thesis, 2023), hlm. 3.

<i>Tepat Administrasi</i>	Rendah	ketidakpastian bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan mereka.
		Literasi digital yang rendah di KPM menjadi penghalang utama dalam proses transaksi, memaksa ketergantungan pada pihak lain.
<i>Tepat Kualitas</i>	Sedang	Variasi kualitas makanan yang diperoleh (terutama beras dan sumber protein) seringkali tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan.

Variasi kualitas makanan yang diterima, terutama beras dan protein, seringkali berada di bawah standar gizi yang seharusnya. Dalam kajian mendalam, tampak bahwa meskipun bantuan secara resmi diterima oleh KPM, aspek lain yang "tepat" seperti harga dan kualitas sangat dipengaruhi oleh dominasi E-Warong yang tidak kompetitif. Selain itu, hambatan administratif dan rendahnya literasi digital menciptakan celah yang membuat bantuan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh KPM karena campur tangan dari pihak luar dalam proses transaksi.

Walaupun indikator-indikator tersebut memberikan pandangan umum mengenai kendala operasional yang dihadapi, masalah yang lebih mendasar justru terletak pada validitas data yang dijadikan acuan distribusi. Jika proses penyaluran terhambat oleh masalah teknis, maka ketepatan sasaran yang merupakan inti dari program perlindungan sosial ini sebenarnya sedang menghadapi krisis integritas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendalami lebih lanjut bagaimana ketidakakuratan data ini terjadi melalui analisis kesenjangan antara basis data pemerintah dan kondisi nyata di lapangan.

b. Analisis Targeting Error dan Sinkronisasi Data dengan 14 Indikator BPS

Analisis yang membandingkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk kategori Desil 1-4 dengan 14 indikator kemiskinan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya masalah sistemik dalam proses validasi di Desa Kalirejo. Penulis menemukan adanya perbedaan yang besar antara status administratif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kondisi ekonomi nyata di lapangan. Fenomena ini terlihat dalam dua jenis kesalahan penargetan yang jelas:

- Kesalahan Inklusi (*Inclusion Error*): Penulis menemukan beberapa KPM yang, menurut parameter ekonomi yang jelas misalnya, kondisi rumah yang permanen, akses air bersih yang cukup, dan kepemilikan aset produktif seharusnya tidak termasuk dalam kategori miskin, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan secara administratif.
- Kesalahan Eksklusi (*Exclusion Error*): Di sisi lain, ada keluarga yang membutuhkan bantuan secara fisik dan ekonomi, tetapi tidak tercatat sebagai

penerima karena kendala administratif, masalah komunikasi, atau karena proses pendataan di tingkat lokal yang tidak efektif.¹²

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem pembaruan data di tingkat desa masih sangat lemah. Musyawarah Desa (Musdes), yang secara resmi berfungsi sebagai forum penting untuk "audit sosial" dengan tujuan memastikan keakuratan data, sering kali hanya menjadi kegiatan seremonial yang tidak memiliki substansi verifikasi yang mendalam dalam praktiknya. Akibatnya, basis data kemiskinan menjadi tidak berubah dan tidak responsif terhadap perubahan ekonomi rumah tangga yang sebenarnya bersifat fluktuatif.

Kurangnya keselarasan antara data makro pemerintah dan realitas mikro di desa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Masalah ketidakakuratan data ini tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis-administratif yang gagal. Secara mendalam, ini menjadi isu etis dan teologis yang fundamental. Kegagalan dalam mengidentifikasi kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan mencerminkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab publik, yang memerlukan analisis yang lebih menyeluruh dari sudut pandang keadilan distribusi dalam konteks ekonomi Islam.

3. Perspektif Ekonomi Islam: Keadilan dan Amanah Pengelola Negara

Permasalahan akurasi data dalam distribusi BPNT di Desa Kalirejo bukan hanya isu administratif atau teknis, tetapi juga persoalan etika dan teologi yang mendasar. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan bantuan sosial mencerminkan tanggung jawab teologis dari pengelola negara (ulil amri) terhadap masyarakat. Ketidakakuratan dalam penargetan bantuan tidak hanya mencerminkan inefisiensi dalam kebijakan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip good governance yang amanah.¹³

a. Amanah sebagai Etika Pendataan

Dalam perspektif ekonomi Islam, integritas data merupakan bentuk amanah publik yang sangat penting. Bantuan sosial adalah hak bagi kelompok penerima yang harus dikelola dengan tanggung jawab penuh. Ketika pemerintah desa membiarkan data yang keliru seperti membiarkan individu yang sudah mampu menerima bantuan sambil mengabaikan warga miskin mereka secara efektif telah mengabaikan hak-hak kelompok rentan. Hal ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik yang

¹² Hanif Hidayattuloh, "Exclusion Dan Inclusion Error Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Jember Tahun 2021," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): hlm. 3.

¹³ A. H. Albarqi, F. Rosman, S. Lestari, dan C. Fauzi, "Perbandingan Simple Additive Weighting dan Weighted Product Pada Penerimaan Bantuan Raskin," *Jurnal Teknologi Sistem Informasi* 5, no. 1 (2024): hlm. 1.

akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dalam dimensi spiritual. Karena itu, akurasi data lebih dari sekadar masalah statistik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral pengelola program kepada masyarakat dan Sang Pencipta.

b. Dampak Kemaslahatan (Maslahah) bagi KPM

Prinsip masalah mengharuskan setiap pengelola program untuk melaksanakan proses verifikasi dengan jujur, transparan, dan objektif. Jika data yang digunakan tidak tepat, maka distribusi bantuan akan gagal memenuhi prinsip keadilan. Dari sudut pandang teologis, praktik ini melanggar kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah, yang menekankan bahwa semua tindakan dan kebijakan pengelola negara dalam mendistribusikan hak rakyat harus berlandaskan pada kemaslahatan nyata bagi rakyat. Apabila distribusi kurang tepat sasaran, potensi manfaat bagi mustahik yang sebenarnya akan hilang, sehingga tujuan utama program sebagai perlindungan sosial akan terabaikan.

c. Keadilan Distributif ('Adl)

Keadilan distributif ('adl) dalam Islam berarti memberikan sesuatu dengan proporsi yang tepat. Fenomena kesalahan penargetan harus dipahami sebagai ketidakadilan distributif yang memicu kecemburuan sosial serta merusak harmoni dalam masyarakat. Keadilan dalam Islam tidak hanya dilihat dari segi pemerataan bantuan, tetapi lebih menekankan kepada dukungan bagi individu yang benar-benar membutuhkan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa sebagai pengelola bantuan sangat bergantung pada integritas dalam mendistribusikan hak kepada sasaran yang benar.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis etis dan teologis ini, penting untuk melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan bantuan sosial. Pemerintah desa tidak lagi dapat bergantung semata-mata pada data yang diterima dari pusat, tetapi perlu melakukan keterlibatan aktif masyarakat dan verifikasi berbasis komunitas guna memastikan bahwa kemaslahatan yang dicapai bersifat lebih luas, adil, dan mampu meningkatkan martabat mustahik dari jerat kemiskinan.¹⁴

4. Rekonstruksi Verifikasi Berbasis Komunitas: Menuju Distribusi yang Berkeadilan

Sebagai pendekatan strategis, studi ini menyajikan model verifikasi yang berlandaskan komunitas. Penguatan Musdes tidak hanya berfokus pada pertemuan resmi, tetapi juga pada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan lapangan setiap kali ada pembaruan data.

¹⁴ Intan Ardhya Pramesti, "Problematisasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen" (Thesis, 2023), hlm. 3.

Dengan menggunakan 14 indikator dari BPS sebagai pedoman standar dalam Musdes, pemerintah desa dapat melakukan "penyaringan" secara mandiri sebelum mengajukan usulan data ke tingkat kabupaten. Ini diharapkan dapat mengurangi *targeting error* dengan signifikan dan memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial yang diberikan oleh negara dapat dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam.¹⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi indikator 6T, tata kelola program bantuan sosial di Desa Kalirejo dinilai belum efektif karena tidak memenuhi asas tepat sasaran, tepat harga, dan tepat administrasi, yang terlihat dari berbagai permasalahan di tingkat tapak maupun struktural, seperti digitalisasi yang memicu ketergantungan akut KPM lanjut usia terhadap pihak ketiga akibat rendahnya literasi digital, sistem keagenan E-Warong yang monopolistik dan non-kompetitif sehingga masyarakat kehilangan hak memilih dan terpaksa membayar harga lebih mahal dengan kualitas gizi tidak konsisten, serta kegagalan penargetan yang berakar dari krisis integritas data DTKS akibat mekanisme pembaruan pasif dan Musdes yang hanya formalitas administratif, terbukti dengan kesalahan inklusi (warga mampu tetap menerima bantuan) dan kesalahan eksklusi (warga miskin terabaikan) ketika disandingkan dengan 14 indikator kemiskinan BPS; dalam perspektif Ekonomi Syariah, karut-marut ini mencerminkan ketiadaan prinsip keadilan distribusi ('adl) dan pemenuhan kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah), sehingga kegagalan ini bukan sekadar kelalaian teknis melainkan pengabaian amanah publik yang mencederai keadilan sosial dan merenggut hak teologis mustahik untuk keluar dari kemiskinan dengan martabat, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem verifikasi di tingkat desa melalui penguatan fungsi Musdes yang berbasis komunitas dan partisipatif, serta adopsi berkala 14 indikator kemiskinan BPS sebagai instrumen penyaringan faktual sebelum data diajukan ke SIKS-NG, guna memulihkan nilai amanah publik dan menjamin distribusi bantuan sosial yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Referensi

- Albarqi, A. H., F. Rosman, S. Lestari, dan C. Fauzi. "Perbandingan Simple Additive Weighting dan Weighted Product Pada Penerimaan Bantuan Raskin." *Jurnal Teknologi Sistem Informasi* 5, no. 1 (2024): 1–12.
- Budiayanti, Nurul. *Dinamika Data Kemiskinan di Indonesia: Tantangan dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian Kebijakan Publik, 2020.

¹⁵ Hanif Hidayattuloh, "Exclusion Dan Inclusion Error Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Jember Tahun 2021," *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): hlm. 3.

- Dodi, Y., R. A. Ekaputri, dan I. Izharudin. "Analisa Program Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Serdang Indah Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." *Ecoplan* 7, no. 1 (2024): 14–25.
- Elia, D., Y. E. Wahyuningsih, dan Y. Yasrizal. "Efektitivitas Program Beras Miskin (Raskin) dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTSPM) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 2240–2251.
- Fauzi, Ahmad. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2024.
- Hidayattuloh, Hanif. "Exclusion Dan Inclusion Error Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Jember Tahun 2021." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): 1–16.
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Umum Program Sembako*. Jakarta: Pedoman Umum, 2020.
- Mubarak, Jaih. *Fikih Kebijakan Publik*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Mundir, Abdillah, dan Sofiyah Nurus Sobah. "Analisis Efektivitas Sistem Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kalirejo." Materi Pemaparan Diseminasi Karya Ilmiah. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2026.
- Nur, dkk. "Digitalisasi Bantuan Sosial dan Tantangan Literasi di Pedesaan." *Jurnal Kebijakan Sosial* 5, no. 1 (2025): 85–98.
- Pramesti, Intan Ardhya. "Problematisasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Masyarakat Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen." Skripsi/Thesis, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023.
- Purnomo, Setyo, dkk. "Efektivitas Jaring Pengaman Sosial di Tingkat Desa: Tantangan Digitalisasi." *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah* 8, no. 1 (2026): 40–55.
- Rahman, F. "Keadilan Distributif dalam Distribusi Zakat dan Bantuan Sosial Pemerintah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 30–45.
- Syaripudin, E. I., dan M. Tri Putri. "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 100–112.
- Tabalong, K., P. K. Selatan, dan I. Telp. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2021): 1295–1308.
- Toporundeng, F. O., W. Bogar, dan F. H. Mamonto. "Implementasi Program Sembako Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Negara* 6, no. 1 (2026): 2025–2038.
- Yusuf, M. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa: Harapan dan Realitas." *Jurnal Pemerintahan Desa* 4, no. 3 (2025): 145–160.